

IDEOLOGI MADZHAB FIQIH DAN SOSIAL POLITIK DALAM KAIDAH NAHWU: Ibnu Madha dalam ar Rad ala al Nuhat

Inayatur Rosyidah

Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana No. 50 Malang. Telp. 085334002004
email: inayatur_rosyidah@yahoo.com

Abstract

Language can not be separated from socio-cultural elements, and political science, including Arabic and other languages . This study will attempt to link the issue of language with the language issue, whether the pattern outside the political and ideological jurisprudence Ibnu Madha an impact on the formulation of rules nahwu and how the relation of language, jurisprudence and politics in the present context. This study includes the type of library research, which uses the resources in the literature discussing the main issues and sub-sub-problems that have been formulated. Ibnu Madha's thought influenced the ideology of fiqh al Dhaheri stream which he embraced in addition to political and social dynamics. Likewise Shiite ideology Nushairiyah an impact on the political complexion Hafiz al Assad and his son in the form of dictatorship in Syria. Thus, language is a symbol of thought and the things of men can be symbolized by language and language as a system of symbols are sometimes used in a wider sense, namely the transformation of language into a tool of ideology, social setting and political upheaval that occurred.

Bahasa tak dapat dipisahkan dari elemen sosial budaya dan Ilmu Politik termasuk bahasa Arab dan bahasa-bahasa lainnya. Kajian ini mencoba menghubungkan antara isu bahasa dan bahasa isu, baik itu pola di luar politik dan ideologi Ilmu Hukum Ibnu Madha serta pengaruhnya terhadap rumusan nahwu serta relasi bahasa, Ilmu Hukum, dan Ilmu Politik dalam konteks kekinian. Kajian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber literatur sebagai bahan diskusi isu utama dan sub-sub-masalah yang telah

diformulasikan. Pemikiran Ibnu Madha mempengaruhi ideologi aliran *fiqh al Dhaheri* yang mencakup dinamika politik dan sosial. Demikian juga Shiite, ideologi Nushairiyah yang berdampak terhadap corak politik Hafiz al Assad dan putranya dalam bentuk kediktatoran di Syria. Sehingga, bahasa adalah simbol pemikiran, dan hal hal yang berkaitan dengan manusia dapat di simbolkan oleh bahasa dan bahasa sebagai sistem simbol terkadang digunakan dalam pengertian yang lebih luas, bernama transformasi bahasa terhadap alat ideologi, pengaturan sosial, dan pergolakan politik yang terjadi.

Key words: Ibnu Madha, ideology, social setting, politics, Nahwu rule

Pendahuluan

Ilmu nahwu merupakan salah satu bidang ilmu bahasa yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam memahami bahasa Arab. Kata nahwu ditinjau dari bahasa adalah bentuk *mashdar* dari kata *نحو*, yang artinya menuju, arah, sisi, seperti, ukuran, bagian, dan tujuan (Ma'luf, 1986: 796). Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas keadaan setiap akhir kata baik yang *mu'rab* (berubah) atau yang *mabni* (tetap) dalam sebuah kalimat (al Thanthawiy, 1997: 1). Nahwu sebagai suatu disiplin keilmuan muncul pertama kali pada abad ke-1 H di Bashrah atas prakarsa Abu al Aswad al Dualiy. Nahwu merupakan ilmu yang lebih dahulu muncul dibanding dengan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya (Allamah, 1993: 15). Tanda-tanda bacaan yang telah dirumuskan oleh Abu Aswad ini pada mulanya sangat sederhana, yaitu hanya berupa pemberian titik-titik (*nuqat*) sebagai tanda baca (*fathah, kasrah dan dhammah*) pada mushaf al Quran (al As'ad, 1992: 53), selanjutnya Khalil bin Ahmad al Farahidi menyempurnakan tanda baca tersebut dengan memberi tanda *fathah, kasrah* dan *dhammah* pada akhir kalimat untuk menjelaskan makna dengan lafadz, perubahan bunyi suatu kata dalam struktur kalimat yang berimplikasi pada perubahan makna gramatikal, dalam sejarah nahwu selanjutnya dikenal sebagai *'alamat al 'irab* (tanda akhir pada setiap kata) (Hasan, 2000: 28).

Kaidah *ushul nahwu* dalam kajian nahwu Arab mempunyai kesamaan dengan *ushul fiqh* dalam kajian ilmu fiqh. Di dalam *ilmu ushul nahwu* terdapat *adillah al nahw* sedangkan dalam *ilmu ushul al fiqh* dikenal *adillah al ahkam* yang kedua-duanya sama-sama digunakan untuk menetapkan hukum. Sedangkan *qawaid al taujih* dalam *ushul al nahw* sama dengan *qawa'id ushuliyah* dalam *ushul al fiqh*. Dari segi tujuan *qawaid al taujih* dalam ilmu *ushul al nahw* sarasannya adalah *الإفادة* (berfaedah) dengan sebutan *لا خطأ ولا لبس* sedangkan dalam ilmu *ushul al fiqh* sarasannya adalah *mashlahah* dengan sebutan *لا ضرر ولا ضرار* (Hasan, 2000: 212-217).

Dalam sejarah ilmu pengetahuan, telah sejak lama para ahli nahwu dikenal mempunyai keterkaitan antara ideologi madzhab fiqih dalam kajian nahwu mereka. Hal ini dapat dengan jelas terlihat melalui banyaknya buku yang disusun oleh ahli nahwu saat itu yang sangat dipengaruhi corak madzhab fiqih mereka. Adalah Abu Musa al Hawari, seorang ahli nahwu Andalusia yang pertama kali mensinergikan madzhab fiqih dengan kajian bahasa Arab (al Zubaydi, t.t: 253).

Corak madzhab fiqih dalam kajian ilmu nahwu semakin berkembang pesat dan meliputi *fuqoha* dari berbagai madzhab fiqih seperti Ibnu al Aghbas yang mensinergikan madzhab fiqih Syafi'i dalam kajian nahwu. Sholih al Ma'afary yang mensinergikan madzhab fiqih Maliki dalam kajian nahwu (al Furdhi, 1997: 37). Madzhab Maliki memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kajian nahwu, hal ini dapat dilihat dari kuatnya penggunaan Hadits sebagai sumber *al Istisyhad* (sebagai dalil pengambilan hukum) dalam kajian nahwu (al Haiti, 1993: 28). Membicarakan masalah nahwu juga tidak pernah lepas dari dinamika politik yang mewarnainya, permasalahan nahwu yang diperdebatkan *madrasah al Bashrah* dan *al Kufah* nyatanya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan metode yang digunakan masing-masing, perbedaan kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik dan lain-lainnya. Sementara itu, dalam sejarah perkembangan ilmu nahwu, perdebatan antara Sibawaih sebagai sosok pemimpin madrasah Bashrah dan al Kisa'i sebagai sosok pemimpin madrasah Kufah ditenggarai sarat dinamika sosial politik yang turut serta membantu melanggengkan dominasi kekuatan kelompok al Kisa'i yang *notabene* mendapatkan dukungan kuat dari sang penguasa Harun al Rasyid (al Thanhawiy, 1997: 30-32).

Nahwu mengalami perkembangan pesat seiring lahirnya aliran-aliran pemikiran, disebut juga *madzhab* atau *madrasah* berikut munculnya tokoh-tokoh nahwu yang mewarnai kajian nahwu melalui pemikiran dan karya monumental mereka, seperti Abu al Aswad al Dualiy, Sibawaih, al Kisa'i, Ibnu Jinni, Ibnu Madha al Qurthuby dan lain sebagainya. Masing-masing tokoh-tokoh nahwu tersebut mempunyai metode tersendiri dalam menyusun kaidah-kaidah nahwu. Dengan demikian, jelas bahwa ilmu nahwu telah banyak melahirkan teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli nahwu itu sendiri. Masalah yang mendasar yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara satu tokoh dengan yang lain adalah masalah pengambilan *al adillah al nahwiyah* (dalil-dalil nahwu) di samping masalah-masalah yang lain seperti ideologi yang dianut oleh tokoh nahwu, baik ideologi *kalam*, ideologi fiqih

maupun ideologi kelompok Islam dan dinamika sosial politik saat perumusan kaidah nahwu. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa Abu al Aswad al Dualiy adalah dari golongan Syi'ah, oleh karena itu ia sering menemui tantangan saat perumusan kaidah nahwu karena banyak orang-orang Bashrah yang kurang pro dengan Ali khususnya dari *mawali* (al As'ad, 1992: 28). Ibnu Jinni adalah salah seorang tokoh nahwu aliran Bagdad yang terkemuka yang menganut aliran *kalam* Mu'tazilah seperti halnya gurunya, Abu Ali al Farisi (Jinni, 1952: 42). Sehubungan dengan ketekunan Ibnu Jinni dalam bidang nahwu dan keteguhannya dalam menganut aliran *kalam* Mu'tazilah yang dikenal menganut aliran rasional, ia juga cenderung bersifat rasional dalam menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang nahwu seperti diperbolehkannya *isytiqaq* (derivasi Arab) dari *ushul arabiyah* (akar kata bahasa Arab) atau *kalam ajnabi* (selain bahasa Arab) melalui metode *qiyas* (menghubungkan sesuatu yang belum dinukilkan kepada yang telah pernah dinukilkan karena ada kesamaan dalam maknanya) (Jinni, 1952: 359).

Ibnu Madha al Qurthuby adalah salah seorang tokoh nahwu aliran Andalusia, pada abad ke-6 H yang terkemuka yang menganut ideologi fiqih *al Dhohiri* (madzhab *skriptualis*) (Madha, 1988: 19-20). Ideologi *al Dhohiri* menjadi aliran madzhab fiqih yang banyak dianut oleh para ahli fiqih dan ahli bahasa waktu itu, seperti halnya Ibnu Hazm yang merupakan guru Ibnu Madha (Ibnu Hazm, 1954: 66). Ibnu Madha mempunyai pengetahuan yang mendalam di berbagai bidang ilmu terutama bahasa dan nahwu. Ia telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk memajukan ilmu pengetahuan. Sebagai bukti begitu cintanya dia kepada ilmu pengetahuan, ia telah meninggalkan karya-karya ilmiah yang dihasilkannya untuk diwariskan kepada generasi sesudahnya, terutama dalam bidang bahasa. Karya-karyanya itu sampai sekarang menjadi bahan rujukan para ilmuwan baik yang sepaham dengan pemikirannya, maupun tidak. Di antara karyanya yang bersifat monumental yang menjadi kajian para ilmuwan dari dulu sampai sekarang adalah kitab nahwu yang bernama *al Rad ala al Nuhat*.

Selain tokoh nahwu, Ibnu Madha dikenal sebagai *qadhi al Jama'ah* pada masa pemerintahan Ya'qub bin Yusuf (580-585) (Al 'Ibady, 1964: 146). Pada masa itu terjadi dua pergolakan sosial politik yang sangat besar, yaitu: pertama, melawan gerakan filsafat dan menindas para filosof, termasuk membenci dan menolak Ibnu Rusyd (w. 595 H). Diperintahkan kepada semua warga di seluruh negeri agar tidak mempelajari filsafat dan kitab-kitab filsafat dibakar (Al Suyuthi, t.t : 323). Kedua, berdirinya daulah Muwahidin sebagai dinasti

baru pengganti dinasti Murabitun sekaligus menghapus polah pemikiran madzhab yang berinti *taqlid* kepada Imam Malik dengan menetapkan madzhab *al Dhohiri* sebagai satu-satunya madzhab dalam pengambilan hukum (Madha, 1988: 8).

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ideologi dan dinamika sosial politik Ibnu Madha al Qurthuby yang telah disebutkan di atas mempengaruhi terhadap lahirnya kaidah nahwu? Abdul Wahid Wafi menyatakan bahwa bahasa sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam perkembangannya, di antara faktor yang paling penting adalah faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya ini mencakup di dalamnya sistem sosial, tradisi, ideologi, peradaban dan lain sebagainya (Wafi, 1998: 9). Selain itu, bahasa adalah simbol dari pemikiran dan apa yang dipikirkan manusia (Muslih, 2005: 106). Dengan kata lain, berbahasa adalah suatu bentuk penyampaian atau perasaan dari orang yang berbicara mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sosial budayanya. Berdasarkan penjelasan di atas, nampak jelas bahwa bahasa tidak bisa terlepas dari unsur sosial budaya, ideologi dan sosial politik, demikian juga dengan bahasa Arab. Munculnya pemikiran nahwu nampaknya juga tidak terlepas dengan ideologi yang dianut oleh seorang tokoh nahwu serta kondisi sosial politik yang terjadi pada masanya. Karena itu, penjelasan di atas mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang ideologi madzhab fiqih dan sosial politik dalam kaidah nahwu (Ibnu Madha dalam *ar Rad ala al Nuhut*). Tulisan ini memaparkan, diawali dengan (a) pengantar, (b) biografi singkat Ibnu Madha, (c) ideologi madzhab fiqih Ibnu Madha dalam kaidah nahwu, (d) dinamika sosial politik Ibnu Madha dalam kaidah nahwu, (e) penutup.

Biografi Singkat Ibnu Madha

Abu al Abbas Ahmad bin Abdurahman bin Muhammad bin Sa'id bin Harit bin 'Ashim bin Madha al Qurthuby (512 H), demikian nama lengkap Ibnu Madha. Ia lahir dan tumbuh besar di Qordofa. Beliau adalah seorang yang dikaruniai kecerdasan otak dan pecinta ilmu sejati. Terbukti, ia meninggalkan Qordofa menuju Isybilyah untuk mempelajari ilmu-ilmu bahasa, nahwu dan sastra pada Ibnu al Rummak (al As'ad, 1992: 162). Guru Ibnu Madha dalam bidang *Fiqih* yang paling terkenal adalah Ibnu al Araby, al Bathruji, al Rasyathi dan Abu Muhammad bin al Manasif ('Ied, 1989: 38).

Ibnu Madha hidup pada masa kekuasaan dinasti Murabitun (1086-1143 M) dan Muwahhidin (1146-1235 M) (Madha, 1988: 13). Dinasti Murabitun

pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf Ibnu Tasyfin di Afrika Utara atas 'undangan' penguasa-penguasa Islam di sana yang tengah memikul beban berat perjuangan mempertahankan negerinya dari serangan orang Kristen. Pada tahun 1062 M ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Maroko (Yatim, 2000: 98).

Dinasti Murabithun adalah penganut madzhab Maliki, di antara ulama fiqih yang terkenal adalah Abu Abdullah Muhammad bin Hamdain. Ulama fiqih madzhab Maliki kala itu hanya bergelut dengan masalah cabang (*furu'*) dalam ilmu ibadah, *mua'malah* dan mengabaikan ilmu *ushul* atau ushul al din (al Quran dan Hadits). Kitab-kitab fiqih Maliki pada dinasti Murabithun menjadi kitab wajib dan madzhab tersebut diterapkan dalam kehidupan seluruh negeri. Di penghujung pemerintahan dinasti Murabithun madzhab Malik seakan mendapatkan momentumnya, aliran madzhab fiqih yang lain dilarang dan dianggap *kufur* seperti saat kitab *al Ihya ulum al Din* karangan al Ghazali sampai di Maroko dan Andalusia, para ahli fiqih menolak keras, bahkan menganggap al Ghazali dan orang-orang yang mempelajarinya sebagai orang gila, kafir dan berpaling dari agama ('Anan, 1990: 77-79). Dalam hal ini, Muhammad 'Abdulloh 'Anan berpendapat bahwa penolakan dinasti Murabithun terhadap kitab *al Ihya ulum al Din* bukan berkaitan dengan aqidah ataupun karena berpaling dari agama, akan tetapi aliran madzhab fiqih Maliki yang hanya bergelut dengan masalah cabang (*furu'*) dan menolak masalah *ushul* ditenggarai menjadi sebab utama ('Anan, 1990: 79). Muwahhidin secara etimologi adalah "penganut paham tauhid", sedangkan secara terminologi adalah sebutan yang dipakai bagi para pengikut Mohammad Ibnu Toumart yang menekankan ajaran tauhid serta menentang kekafiran dan menyerukan umat untuk jihad *fi sabilillah* (al 'Ibady, 1964: 159).

Berdirinya dinasti Muwahhidin yang menggunakan ideologi *al khusyu'* (berserah diri) dan *ijlal* ('Anan, 1990: 12). Merupakan bentuk protes terhadap madzhab Maliki yang kaku dan konservatif yang berkembang pada masa dinasti Murabithun (Bosworth, 1993:5 2). Dinasti Muwahhidin berdiri di Maroko dan Spanyol tahun 524-667H/1130-1269 M. Namun keterangan lain menyebutkan bahwa dinasti ini berdiri sejak tahun 1146 M (Yatim,2000: 98) atau 1114 M berdasarkan ajaran pendirinya, yaitu Muhammad Ibnu Toumart dan pernah mengalami masa kejayaannya di kawasan Afrika Utara dan Spanyol selama lebih dari satu abad yaitu sejak tahun 515-667 H/1121-1269 M. Pendirinya adalah Ibnu Toumart yang merupakan orang Barbar yang berlaku zuhud serta menerima kesetiaan dari suku Masmudah dan beribu kota di Maroko yang

didirikan oleh dinasti Murabitun (Mufrodi, 2007: 112-113). Ibnu Toumart wafat pada tahun 1130 M, sebagai penggantinya dipilih Abd al Mu'min. Pemerintahan al Mu'min telah membuka jalan mulus bagi penguasa berikutnya untuk mengembangkan kekuasaan Muwahhidin di Spanyol dan Afrika Utara. Ia berhasil menggulingkan dinasti Murabitun dan pada tahun 1147 M, seluruh wilayah kekuasaan dinasti Murabitun dapat di kuasainya (Hitti, 1974: 546).

Abd al Mu'min meninggal pada tahun 1163 M (Thohir, 2004: 108) dan digantikan putranya Abu Ya'kub Yusuf (580-585 H). Masa ini adalah masa pengabdian Ibnu Madha kepada negara dan perkembangan ilmu pengetahuan. Setelah bepergian jauh ke Sabtah untuk mengkaji hadits Nabi Saw pada ulama hadits dan fiqh terbesar di Maroko pada masanya yaitu al Qadhi Ayyad (Madha, 1988: 18) dan belajar ilmu bahasa di Cordova dan Seville. Ibnu Madha pergi dan menetap di Maroko. Pemerintah Muwahhidin menyambut baik kedatangannya, bahkan ia diberi kepercayaan untuk mengajar putra-putra khalifah al Mu'min bin 'Ali. Ini merupakan batu loncatan karir Ibnu Madha sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan perkembangan ilmu (al 'Ibady, 1964: 166). Karena pengabdian dan kesetiaannya, Ibnu Madha diangkat sebagai *qadhi* (hakim yang menetapkan persoalan agama) di Fas, bahkan ia diangkat *qadhi al Jama'ah* pada masa pemerintahan Ya'kub bin Yusuf (580-585) (al 'Ibady, 1964: 146). Selain sebagai *qadhi* pada daulah Muwahhidin, Ibnu Madha merupakan tokoh nahwu Andalusia yang terkemuka pada masanya, ia tercatat sebagai penyusun buku *al Rad ala al Nuhat, al Masyriq fi al Nahwi, Tanziyah al Quran* dan *'Amma La Yaliqu bi al Bayan*. Sayangnya, hanya karya pertama yang masih bisa dibaca dan dikaji hingga sekarang, sedangkan karya lainnya telah lenyap dan tidak sempat dicetak hingga kini (Dhaif, 1983: 304-305).

Ideologi Fiqih Ibnu Madha dalam Kaidah Nahwu

Arti kata *ideology* menurut *Kamus Oxford* adalah (1) *a set of ideas that an economic or political system is based on*; (2) *a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave*. Sedangkan menurut Martin Hewitt, ideologi adalah *"the system of ideas and imagery through which people come to see the world and define their needs and aspiration"*, dan *"a system of ideas, beliefs and values that individuals and societies aspire toward."* (Hewitt, 1992: 1 dan 8). Franz Magnis-Suseno mengurai arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah (Suseno, 1992: 230). Dari tiga arti kata ideologi tersebut, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah

ideologi dalam arti netral, yaitu keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut (Hewitt, 1992: 1 dan 8).

Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi atau aliran *al Dhohiri* suatu madzhab *fiqih* yang dianut oleh Ibnu Madha. Yang dimaksud aliran *al Dhohiri* adalah aliran yang menolak cabang-cabang pemikiran dari suatu persoalan (*furu'*) dan lebih mengedepankan sumber hukum *ushul* (al Quran dan Hadits) dan hanya menerapkan aspek tersurat (*dhahir*) dalam al Quran dan al Hadits sebagai sumber hukum dan menolak segala macam *ta'wil* (al Yasiri, 2003: 387-388). Madzhab menurut bahasa ialah *maslak*, *thariqah* dan *sabil*. Sedangkan menurut istilah ialah pendapat yang diambil oleh seorang imam dan para imam dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum *ijtihadiyah* (Sarwat, 2011: 214). Berbagai aliran *fiqih* nyatanya mampu memberi corak baru dalam kajian nahwu di Andalusia, namun diantara aliran *fiqih* tersebut, aliran *fiqih al Dhohiri* mendapat perhatian besar dari kalangan *fuqoha* dan *lughowiyyin* serta miliki pengaruh yang sangat besar dalam kajian nahwu di Andalusia. Aliran *fiqih al Dhohiri* menolak *ta'wil* dan hanya bersumber pada teks tersurat dalam al Quran sebagai dalil penetapan hukum. Di antara ahli *fiqih* yang menganut aliran *al Dhohiri* adalah Ibnu Hazm yang tertuang dalam bukunya *al Ihkam fi ushul al Ahkam* (Khalifah, 1986: 39).

Satu setengah abad kemudian, Ibnu Madha berhasil mengadaptasikan madzhab *fiqih al Dhohiri* dalam kajian nahwu melalui karya monumental berjudul *al Rad ala al Nuhat*. Sebagai bentuk gugatan Ibnu Madha terhadap pandangan-pandangannya nahwu yang dikembangkan para pendahulunya. Sejarah menunjukkan bahwa nahwu sebelum masa Ibnu Madha diklaim telah terpengaruh oleh filsafat Yunani. Menarik dicatat mengenai awal keterpengaruhan nahwu terhadap filsafat Yunani. Menurut Abd al Karim Muhammad al As'ad nahwu mulai bersentuhan dengan filsafat Yunani ditandai dengan sosok 'Abdullah bin Abi Ishaq al Hadrami (w. 117 H) (Allamah, ^{1993: 134-135}), orang pertama yang dianggap meletakkan dasar-dasar konseptual nahwu dan mengembangkan pemikiran mengenai *illat* dalam kajian nahwu. Sejak saat itulah, nahwu mulai berkembang dalam nuansa filosofis. Pemikiran tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh Khalil bin Ahmad al Farahidi (w. 175 H), seorang tokoh besar madrasah Basrah. Khalil dipandang sebagai jembatan pembuka masuknya pengaruh filsafat Yunani dalam kajian nahwu (al As'ad, 1992: 21-22).

Akibat dari keterpengaruhan tersebut, para ahli nahwu memahami tiap kata dalam suatu kalimat sebagai faktor dari ‘*amil*’ yang implikasinya terlihat pada persoalan *i’rab mahalli* dan *taqdiri*. Dengan teori ini, perubahan bunyi akhir suatu kata dalam kalimat mengalami pergeseran dari *i’rab rafa’*, *nasab jarr* dan *jazm*. Spekulasi ‘*amil*’ yang mempengaruhi *i’rab* suatu kata kerap kali menjadi perdebatan di antara ulama’ nahwu berikut narasi filosofis yang menyertainya seperti permasalahan ‘*amil*’ dalam *maf’ul bih*. Menurut Basrah *fi’il* yang menjadi ‘*amil*’ bagi *fa’il* dan *maf’ul bih*, sedangkan mayoritas ulama’ Kufah berpendapat bahwa *fi’il* dan *fa’il* merupakan *amil* bagi *maf’ul bih*, namun sebagian kecil ulama Kufah berpendapat bahwa hanya *fa’il* yang menjadi ‘*amil*’ bagi *maf’ul* (al Thawil, 1985: 85).

Hal ini yang mendorong Ibnu Madha untuk mengkritik dan menggugat nahwu yang telah lebih dahulu mapan untuk diarahkan kepada tujuan praktis yaitu guna memfasilitasi para peserta didik bahasa Arab agar dapat membaca dan berkomunikasi dalam bahasa Arab secara baik dan benar sesuai kaidah yang ada. Menarik dicermati bahwa Ibnu Madha menggugat nahwu dengan menggunakan dasar pemikiran aliran fiqih *dhahiri* (Zahrah, 1962: 398). Berdasarkan dengan metode penalaran dalam aliran *dhahiri* bahwa metode pengambilan hukum berpegang pada lahiriah teks, maka kaidah nahwu seharusnya sesuai teks yang ada atau yang biasa dipakai orang Arab dan bukan nuansa gramatika bahasa Arab yang sarat dengan muatan filsafat.

Melalui bukunya *ar Rad ala al Nuhat*, Ibnu Madha menyatakan: “Tujuan saya dalam buku ini adalah menghapuskan apa yang tidak diperlukan oleh ahli nahwu, dan saya tegaskan bahwa mereka telah bersepakat dalam kesalahan” (Madha, 1988: 58). Adapun gugatan-gugatan Ibnu Madha tentang nahwu yang tertuang dalam bukunya *ar Rad ala al Nuhat* sebagai bentuk kritiknya terhadap nahwu yang dikembangkan para pendahulunya adalah penghapusan (1) teori ‘*amil*’, (2) *mentaqdirkan al amil al makhduf* pada *fi’il muta’adi* yang didahului *nida’*, *muallaq* bagi huruf *jar* dll (3) *illat* kedua dan ketiga, (4) penggunaan *qiyas* dalam nahwu, dan (5) latihan (*tamarin*) nahwu yang tidak praktis karena menyebabkan nahwu menjadi rumit dan sulit dipelajari (Madha, 1988: 86-140).

Dalam hal ini, Syauqi Dhaif menyatakan bahwa pengaruh fiqih *al Dhahiri* jelas terlihat dalam buku *al Rad ala al Nuhat* sebagai wujud penolakan Ibnu Madha terhadap para ahli nahwu *masyriq* (Bashrah dan Kufah) yang terlalu filosofis sehingga terkesan tidak realistis dan sulit difahami (Madha, :١٩٨٨ ٢٠-١٩). Selain *ar Rad ala al Nuhat*, Ibnu Madha juga menulis buku *al Masyriq fi al Nahwi*, *Tanziyah al Quran* dan ‘*Amma La Yaliq bi al Bayan*. Diperkirakan

bahwa *al Masyriq fi al Nahwi* berisi tentang pencerahan nahwu dari berbagai kerumitan dan perdebatan yang signifikan. Sayangnya, dua karya terakhir hingga sekarang tidak ditemukan, sehingga formulasi konkret pembaharuan nahwunya tidak dapat dikaji lebih mendalam ('Ied, 2006: 38-42).

Bahasa adalah aspek sentral dari penggambaran suatu objek, dan lewat bahasa ideologi terserap di dalamnya. Menurut Rahmat, tak berlebihan dikatakan bahwa ideologi membentuk dan dibentuk oleh bahasa (Rahardjo, 2002: 67). Senada dengan pernyataan di atas Jean Piaget menegaskan bahwa pikiran yang membentuk bahasa, tanpa pikiran bahasa tidak akan ada. Pikiranlah yang menentukan aspek-aspek sintaksis dan leksikon bahasa bukan sebaliknya (Chaer, 2003: 54). Sehingga berbicara tidak semata-mata menggunakan kata-kata, melainkan suatu bahasa yang diilhami oleh pikiran dan penalaran. Dan bahasa sebagai sistem lambang-lambang kadang-kadang dipakai dalam arti yang lebih luas yaitu bahasa menjadi sebuah piranti transformasi ideologi, wawasan keilmuan dan hasil perenungan kefilsafatan sehingga pengetahuan manusia terus bertambah dan dapat diturunkan kepada generasi kemudian.

Melalui bahasa manusia bisa berpikir runtut dan sistemis yang membantu manusia mengungkapkan apa yang ada dipikirkannya, sehingga pikiran dan bahasa adalah alat untuk berlakunya aksi. Sebagai realitas simbolik, bahasa dalam hal ini kaidah nahwu tampaknya tidak bisa dipisahkan dari dunia batin sosok *nahwiyyin* yang merumuskannya. Ideologi madzhab fiqih *dhahiri* Ibnu Madha rupanya berpengaruh besar dalam perumusan kaidah nahwu yang menghendaki kesesuaian dengan realitas teks yang bersifat praktis dan jauh dari argumen narasi filosofis yang berbelit-belit dan sulit dimengerti.

Sosial Politik Ibnu Madha dalam Kaidah Nahwu

Kehidupan sosial terdiri dari susunan masyarakat, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, adat kebiasaan dan sebagainya. Ibnu Madha hidup pada masa dinasti Murabitun dan Muwahhidin. Kekuasaan Muwahhidin tumbuh dan berkembang di Afrika Utara dan Spanyol adalah karena ingin memurnikan ajaran Islam yang telah dikotori dinasti Murabhitun pada fase akhir kekuasaannya. Dinasti Muwahhidin ini berawal dari sebuah gerakan dakwah agama dan beralih menjadi kekuatan politik (Al 'Ibady, 1964: 159). Dinasti ini mampu meraih kejayaan karena pemimpin yang kuat serta cinta ilmu pengetahuan. Prinsip tauhid yang memerangi golongan *al Tashbih* dan *Tajsim* yang menganggap tuhan mempunyai bentuk (antropomorfisme) karena hal ini bertentangan dengan ayat al Quran dan harus dipahami seperti adanya

dan mengakibatkan kekufuran (Al 'Ibady, 1964: 167).

Dinasti Muwahhidin menentang madzhab Maliki yang sebelumnya mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Murabitun terlebih pada masa Yakub bin Yusuf yang menetapkan madzhab fiqih *al Dhahiri* sebagai satu-satunya madzhab yang diakui negara. Kehancuran dinasti Murabitun mempunyai dampak positif terhadap perkembangan kegiatan intelektual, yang sebelumnya melemah dan tidak banyak mengalami kemajuan di Andalusia. Para penguasa dinasti Muwahhidin sangat menghargai dan cinta akan ilmu pengetahuan dan seni. Pada fase ini, Ibnu Madha mengawali karirnya sebagai pengajar di istana, pada puncak karirnya ia diangkat sebagai *qadhi al Jama'ah* yang berpusat di Maroko pada masa pemerintahan Yakub bin Yusuf (Al Suyuthi, t.t: 323).

Meskipun kedudukan *qadhi al Jama'ah* saat itu tidak *se-prestisius* pada masa daulah Abbasiyah karena hanya berkuat pada persoalan agama dan tidak berperan serta pada kultur pemerintahan seperti halnya pada masa Abbasiyah (Al 'Ibady, 1964: 146). Namun, kedudukan itu mendapatkan tempat terhormat pada masanya, mengingat Dinasti Muwahhidin sangat mengagungkan para *fuqoha* yang berperan vital sebagai upaya menjaga akidah masyarakat agar tetap di jalan yang benar.

Dimensi sosial Ibnu Madha sebagai *qadhi* yang merupakan 'kaki tangan' sang penguasa untuk menyampaikan pandangan pandangan madzhab *al Dhohiri* dalam fiqih bukan tidak mungkin Ibnu Madha berusaha mengsinergikan aliran fiqih yang dianutnya dalam perumusan kaidah nahwu dengan mengarang buku *ar Rad ala al Nuhat*. Betapa tidak, bahasa dan kenyataan sosial merupakan satu kesatuan. Karenanya, mempelajari atau mengamati perubahan bahasa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dimana dan kapan bahasa tersebut tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, jika kita membicarakan bahasa secara realistis, bukan sebagai suatu misteri ia tidak dapat dilepaskan dari kedua cirri utama tersebut. Bahasa berperan dalam komunikasi dan merupakan bagian kehidupan sosial (Rahardjo, 2002: 51). Bahasa terikat, dikonstruksi dan direkonstruksi dalam kondisi khusus serta latar sosial tertentu mengingat bahasa berperan untuk merepresentasikan hakekat pengetahuan konseptual manusia. Kedudukan sosial Ibnu Madha sebagai *qadhi al Jama'ah* pada masa pemerintahan Muwahhidin secara tidak langsung hal ini mengakibatkan keseragaman daya dan kemampuan ungkap bahasa-bahasa termasuk dalam perumusan kaidah nahwu selain keseragaman pola pikir untuk menggunakan aliran fiiqih *al Dhahiri* sebagai madzhab resmi negara.

Tidak diragukan lagi bahasa merupakan rangkaian kegiatan sosial. Seorang ahli bahasa Antoine Meillet menegaskan bahwa bahasa tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang tidak tergantung pada masyarakat di mana bahasa itu digunakan; “*language est eminentement un fait social*” (Meillet, 1948: 230) dan dia menggunakan *un fait social*; bahwa bahasa adalah fakta sosial.

Selain dimensi sosial, rupanya kultur politik dinasti Muwahhidin yang menganut madzhab fiqih *al Dhohiri* ditenggarai turut berpengaruh dalam perumusan kaidah nahwu Ibnu Madha. Bagaimana tidak, nuansa politik pasca runtuhnya pemerintahan Murabitun dan lahirnya pemerintahan Muwahhidin jelas membawa perubahan pada kultur politik di Andalusia yang menghapuskan madzhab fiqih Maliki dan menetapkan madzhab fiqih *al Dhohiri* sebagai madzhab yang diakui negara. Politik adalah masalah kekuasaan yaitu kekuasaan untuk membuat keputusan, mengendalikan sumber daya, mengendalikan perilaku orang lain dan sering kali juga mengendalikan nilai-nilai yang dianut orang lain (Thomas dan Wareing, 2007: 50). Mochtar Pabottinggi bahkan lebih tegas menyatakan bahwa bahasa takkan pernah lepas dari politik (Pabottinggi, 1996: 213).

Bermula dari gerakan keagamaan dan berubah menjadi gerakan politik, berkat usaha dan perhitungan yang matang maka tercapailah sebuah kekuasaan politik oleh gerakan tersebut. Sehingga sejak awal berdirinya, dinasti Muwahhidin seakan mempunyai agenda vital yang ingin direalisasikan yaitu penghapusan madzhab Maliki yang dianggap membawa kekufuran dan lebih mengedepankan *ta'wil* manusia dalam memahami al Quran dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam serta mengganti madzhab sebelumnya dengan madzhab fiqih *al Dhohiri* yang menggali hukum Islam bersumber pada al Quran dan Hadits yang dipahami seperti adanya (*dhahir*) tanpa adanya *ijtihad bi ra'yi* dan *ta'wil* yang terkesan mengada-ada.

Kuatnya pengaruh dinamika politik *al Muwahhidun* yang menentang madzhab Maliki dan menetapkan madzhab fiqih *al Dhahiri* sebagai madzhab resmi negara di Andalusia rupanya sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan studi kritis Ibnu Madha terhadap kajian nahwu. Sebagai penganut madzhab fiqh *al Dhohiri* yang menolak *ta'wil* dan pengambilan hukum didasarkan pada lahiriah teks al Quran (*dhahir nushus*) menjadi suatu keniscayaan Ibnu Madha ingin mensinergikan dalam kaidah nahwu berupa analisis fenomena bahwa sebagaimana adanya, menolak *taqlid*, ‘illah dan jauh dari nuansa filosofis.

Pemikiran nahwu Ibnu Madha yang tertuang *al Rad ala al Nuhat* tampak sejalan dengan dimensi politik Muwahhidin yang mewajibkan madzhab fiqih

al Dhohiri sebagai satu-satunya madzhab yang diakui negara. Dengan demikian jelas bahwa semua ini memperlihatkan betapa kuat atau dominannya *setting* sosial dan politik penguasa dalam merekayasa lahirnya bahasa sebagai cermin daya pikir masyarakat pemakainya

Relasi Bahasa, Fiqih, dan Politik dalam Konteks Kekinian

Syiah secara etimologi didefinisikan sebagai pengikut, pendukung, pembela, pencinta, yang semuanya mengarah kepada makna dukungan kepada ide atau individu dan kelompok tertentu (Shihab, 2007: 60). Adapun Syiah secara terminologi terdapat beragam pengertian sesuai perspektif masing-masing. Al Jurjani mendefinisikan syiah sebagai mereka yang mengikuti sayyidina Ali r.a dan percaya bahwa beliau adalah imam sesudah Rasul SAW dan percaya bahwa *imamah* tidak keluar dari beliau dan keturunannya (Shihab, 2007: 61). Selain itu, Abu Zahrah mendefinisikan syiah sebagai madzhab politik yang pertama lahir dalam Islam madzhab mereka tampil pada akhir masa pemerintahan Usman, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali. Mereka mengagumi bakat-bakat, kekuatan beragama dan ilmunya. Sehingga mereka mengeksploitasi kekaguman mereka terhadap Ali untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka tentang dirinya. Ketika keturunan Ali, yang sekaligus keturunan Rasulullah mendapat perlakuan dhalim yang semakin hebat dan banyak mengalami penyiksaan pada masa Bani Umayyah, rasa cinta mereka terhadap Ali semakin mendalam. Mereka memandang *Ahl Bait* sebagai syuhada dan korban kedhaliman. Dengan demikian meluaslah madzhab syiah dan pendukungnya semakin banyak (Zahrah, 1996: 34).

Dalam perkembangannya, kelompok Syi'ah terpecah menjadi 20 sekte; dua sekte Syi'ah Kaisaniyah, tiga sekte Syi'ah Zaidiyah, dan lima belas sekte Syi'ah Imamiyah. Kelompok Syi'ah Nushairiyah adalah bagian dari Syi'ah Imamiyah (Al Halabi, 1404 H: 21-26). Nushairiyah adalah gerakan Bathiniyah Syi'ah ekstrim yang muncul pada abad 3 H. Nama Nushairiyah diambil dari nama pendirinya, Muhammad bin Nushair an Numairi, yang memiliki *kunyah* (nama panggilan) Abu Syu'aib. Ia berasal dari Persia dan merupakan seorang penganut Syi'ah Itsna 'Asyariyah. Abu Syu'aib terlibat perselisihan yang tajam dengan para pengikut Syi'ah Itsna 'Asyariyah lainnya. Akibat perselisihan ini, Ibnu Nushair kemudian memisahkan diri dan membentuk kelompok sendiri yang kelak disebut Nushairiyah. Ia memimpin kelompok Nushairiyah sampai ia meninggal, tahun 260 H atau 270 H (Al Khathib, 1406 H: 322-323). Berbagai aliran keagamaan yang kafir seperti *Bathiniyah*, *Ismailiyah*, Budha, dan

sekte-sekte kafir yang berasal dari agama Majusi masuk bergabung ke dalam kelompok Nushairiyah (Al Majdi, 2011: 1).

Dalam kancah politik, Syi'ah Nushairiyah mendapatkan keleluasaan dan dukungan pemerintah untuk bergerak pada masa Bani Buwaih 334-447 (945-1055 M) di Baghdad. Sejak saat itu Syi'ah Nushairiyah membuka babak baru dengan mengandeng pemerintah untuk menyebarkan serta menguatkan ajaran mereka, seperti al Khushaibi yang menyebar luaskan jaringan sektenya di kota Halb (Alepo) di Suriah sebagai pusat gerakannya dengan dukungan penuh dari penguasa daulah Hamdaniyah, Saifud Daulah Ali bin Hamdan al Hamdani (Al Khathib, 1406 H: 325-339). Dengan demikian, sejarah berkembangnya Syi'ah Nushairiyah di Suriah dimulai sudah dirintis sejak ratusan tahun lalu.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1966, Nushairiyah berhasil naik ke puncak kekuasaan tertinggi di Suriah dengan dukungan partai sosialis Baath, mereka melakukan kudeta militer dan sukses mengantarkan pemimpinnya, Hafiz al Assad menjadi perdana menteri lalu sebagai presiden pada tanggal 22 Februari 1971 sampai 10 Juni 2000. Ia segera menjadi diktator bertangan besi yang menjadikan kelompok Nushairiyah yang hanya 10 % dari keseluruhan penduduk Suriah, sebagai pemegang kendali semua urusan (politik, ekonomi, militer, pendidikan, kebudayaan, keagamaan) di Suriah (Al Halabi, 1404 H: 39-42).

Peristiwa pergolakan politik yang tengah terjadi di Suriah sejak 15 Maret 2011 berbuntut penolakan penyerahan diri Presiden Suriah Bashar al Assad nyatanya tidak semata-mata didasari oleh kepentingan politik untuk menyelamatkan kekuasaan rezim Partai Baath, partai sosialis yang telah mencengkeram rakyat Suriah selama puluhan tahun dengan kekuatan senjata. Sesungguhnya rezim partai Baath juga dilatar belakangi oleh faktor ideologi dan agama. Partai Baath telah didominasi oleh kelompok Nushairiyah sejak era Hafizh Assad. Putra Hafizh Assad, Bashar al Assad merupakan dinasti terakhir dari al Assad yang menjadi penjaga berbagai kepentingan di Timur Tengah. Bukan hanya entitas politik Syiah, yang sekarang ini membenteng dari Lebanon, Irak, Iran, Bahrai, Saudi dan Yaman, tetapi Israel juga sangat takut, bila Bashar al Assad jatuh, dan berkuasa kekuatan Sunni, terutama kekuatan politik Ikhwanul Muslimin, maka itu berarti menjadi ancaman yang lebih besar, dibandingkan ancaman Bashar al Assad (Al Battar, 2011: 1)

Demonstrasi dilakukan oleh rakyat di berbagai kota dan desa. Rakyat menuntut kesamaan hak, kebebasan, dan kehidupan yang aman. Mereka

juga menuntut kebebasan bersuara dan negara demokrasi yang mewujudkan kesetaraan hak warga negara untuk hidup dengan sejahtera tanpa adanya penindasan dan ketakutan atas jeruji besi penjara. Sejak tanggal 15 Maret 2011, sederet lembaga militer yang dipimpin oleh Bashar Assad, sang presiden, dan Menteri Dalam Negeri Suriah, meliputi 17 lembaga militer negara, intelijen, dan pasukan khusus kepresidenan telah membunuh para demonstran yang tak berdosa. Para demonstran turun ke jalan dengan telanjang dada, tanpa membawa batu, tongkat ataupun senjata lainnya. Dari data-data yang disampaikan, sejak tanggal 15 Maret 2011 hingga 15 Februari 2012, jumlah yang dibunuh oleh rezim Bashar Asaad lebih dari 10.000 di antaranya 600 perempuan, 430 anak-anak, dan yang terluka 5000. Mereka yang dipenjarakan lebih dari 100.000, yang mengungsi ke Lebanon, Turki, Jordan, Arab Saudi dan lainnya lebih dari 530.000. Bahkan anak-anak kecil pun terbunuh karena mereka menuliskan di tembok-tembok sekolah mereka: "kita ingin kebebasan... kita ingin merdeka... dan kami tidak rukuk kecuali kepada Allah". Selain itu menurut Syaikh Ghiyath Abdul Baqi bin Ibrahim revolusi Suriah terjadi karena kesabaran rakyat Suriah sudah habis atas penindasan dan kekejaman rezim Asad yang telah memerintah dengan sekte Syi'ah Nushairiyah, baik militer, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam demonstrasi tersebut, puluhan kota diserang tentara rezim Asad, ribuan nyawa melayang, masjid-masjid dihancurkan, mushaf al Quran dibakar, orang-orang muslim Ahlus Sunnah yang sedang shalat dibunuh bahkan di dinding-dinding masjid ditulis *laa ilaaha illa bashar al asad* (tiada tuhan selain Bashar al Asad) (Abdul Baqi, 2012: 1).

Perlu dicatat bahwa pada pemerintahan Hafizh Assad, Suriah benar-benar dibawa ke dalam pemerintahan diktator militer dengan rezim Partai Ba'ath. Suriah sendiri bertindak represif terhadap kelompok gerakan Islam yang dianggap Partai Ba'ath, merupakan ancaman utama bagi kekuasaannya. Sehingga pada masa kekuasaannya, Hafizh al Assad melakukan tindakan represif pada kelompok Islam militan. Pada 1979, terjadi serangan terhadap sekolah kader militer di Aleppo dan kantor Partai Ba'ath. Pihak yang dituduh melakukannya ialah kelompok dakwah Ikhwanul Muslimin. Tak hanya itu, kelompok gerakan Islam ini berdemo besar-besaran dan melakukan aksi boikot di Hama, Homs, dan Aleppo pada Maret 1980. Dengan alasan inilah al Assad lebih ketat dalam melaksanakan kebijakan represifnya terutama terhadap kelompok dakwah Islam seperti Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Tindakan kekerasan politiknya ini memuncak dalam peristiwa pembantaian Hama di awal 1980-an (sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Hafez_al_Assad).

Dengan demikian, bermula dari gerakan keagamaan ideologi syiah Nushairiyah dan berubah menjadi gerakan politik, berkat usaha dan perhitungan yang matang maka tercapailah sebuah kekuasaan politik oleh gerakan tersebut. Seperti halnya sekte-sekte Syi'ah ekstrim lainnya, kelompok Nushairiyah bertindak ekstrim untuk mengamankan kekuasaannya. Selama 29 tahun berjaya, rezim Hafizh al Assad memegang kendali semua urusan politik, ekonomi, militer, pendidikan, kebudayaan, keagamaan di Suriah. Ia berperan aktif dalam proses sosial politik berupa menguatkan kekuasaannya melalui bahasa berupa membuat keputusan, mengontrol sumber penghasilan, mengontrol perilaku kelompok lain, dan mengontrol nilai-nilai yang dipercayai kelompok lain sesuai dengan ideologi yang ia anut.

Dalam hal ini, setidaknya, Habermas telah mengingatkan bahwa proses-proses sosial politik tidak sekadar beranyamkan praktis kerja, tetapi komunikasi, yakni bahasa. Oleh karena itu, penggelaran kekuasaan pun tidak terbatas pada pengendalian sarana teknis dan sistem reproduksi material, tetapi tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya manipulasi terhadap sistem-sistem simbol dan reproduksi ideasional (Rahardjo, 2002: 5). Politik selalu terkait dengan kekuasaan, dalam menjalankan aktivitas politik, faktor kebahasaan memegang peranan penting (Darma, 2009: 91). Kekuasaan sebagai kekuatan dalam masyarakat yang membuat tindakan terjadi, sehingga dengan menelitinya kita bisa mengenali siapa yang mengendalikan apa dan demi kepentingan siapa (Thomas dan Wareing, 2007: 18). Dalam konteks ini, Alwi as Saqaf menyatakan bahwa realita kontemporer memang menjadi bukti tak terbantahkan atas persatuan Syiah Itsna 'Asyariyah dan Nushairiyah. Sebagai sesama syi'ah ekstrim yang memiliki banyak akidah kufur (meyakini unsur ketuhanan pada diri Ali dan imam-imam *ahlul bait*, meyakini para imam memiliki pengetahuan tentang hal hal yang ghaib, meyakini para imam berkuasa mengatur kehidupan seluruh makhluk, dst), amat wajar bila anak bernama Nushairiyah ini pulang kandang ke pangkuan induk semangnya, Syiah Itsna Atsariyah. Keberpihakan Syiah Nushairiyah yang membantu Syiah Itsna 'Asyariyah dalam membantai kaum muslimin di Lebanon dan Suriah sudah bukan rahasia lagi (al Majdi, 2011: 1).

Dengan demikian, dapat dipertegas bahwa kuatnya pengaruh dinamika politik yang dibangun Hafizh al Assad sangat membantu untuk mengontrol perilaku dan kehidupan orang atau kelompok lain di Suriah untuk tunduk dan patuh di bawah kekuasaannya yang menganut ideologi Syiah Nushairiyah dengan didorong kekuatan militer yang tangguh dan diktator.

Sebagai suatu potret fenomena umum dalam kehidupan manusia yang berbangsa dan berbudaya, politik tidak lagi dipandang sebagai orang-orang serta birokrasi yang ada dalam pemerintahan suatu negara. Akan tetapi, bahasa sudah menjadi element dasar kokohnya legitimasi politik tertentu, penggunaan retorika politik dengan menggunakan gaya bahasa, metafor untuk mengkonkretkan yang abstrak dan untuk menguatkan pesan ideologi.

Kekuasaan sering kali ditunjukkan lewat bahasa, dan bahkan kekuasaan juga diterapkan atau dilaksanakan lewat bahasa. Seperti contoh, kekuasaan politik dijalankan lewat bahasa seperti pidato, rapat, undang-undang, hukum dibuat dan dibahas dengan bahasa (Thomas dan Wareing, 2007: 19) Kekuasaan diartikan sebagai setiap kemampuan, kapasitas dan hak yang dimiliki seseorang, lembaga, untuk mengontrol perilaku dan kehidupan orang atau kelompok lain Dalam praktik politik, kekuasaan menyebar bukan saja lewat alat-alat produksi, tetapi juga melalui bahasa. Mereka yang memiliki kekuasaan juga menguasai bahasa, yakni bahasa yang membawa kepentingan kekuasaannya. Bahasa politik diartikan sebagai ucapan atau tulisan yang digunakan oleh seseorang untuk mengendalikan kekuasaan (Rahardjo, 2007: 48-49).

Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Hafizh al Assad selalu mendayagunakan bahasa untuk kepentingan politik tertentu. Seperti menuduh kelompok dakwah Islam seperti Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin sebagai musuh negara yang ingin menghancurkan kestabilan Suriah. Hingga tindakan kekerasan politiknya ini memuncak dalam peristiwa pembantaian Hama di awal 1980-an. Sementara itu, salah satu strategi linguistik yang di pakai untuk membuat orang lain menjadi segan, terintimidasi atau membingungkan pendengar mereka adalah gaya bahasa persuasi (retorika). Dalam hal ini gaya bahasa berperan penting dalam bahasa politik guna menanamkan ideologi serta pemikiran yang ingin disampaikan oleh penutur berupa ide-ide abstrak menjadi lebih mudah diterima, mengaburkan maksud dan mempunyai makna emosional yang besar bagi pendengar (Rahardjo, 2002: 67). Seperti Bashar al Assad yang berusaha memebentuk barisan pengikut setianya pada saat demonstrasi berkecamuk dengan menyatakan kepada anak-anak muda "militan" kaum Alawiyah (salah satu sekte Syiah) bahwa kekuatan asing yang hendak menghancurkan Suriah sekarang adalah Saudi dan antek-anteknya, kelompok Salafi, yang akan melakukan pemusnahan terhadap sekte Syiah Alawiyah sebagaimana cerita sejarah .

Bahasa sebagai alat untuk melahirkan ungkapan-ungkapan batin meliputi ideologi yang ingin disampaikan seorang penutur kepada orang lain,

dalam hal ini kekuasaan dan politik Hafizh al Assad dan putranya nyatanya bergandengan dengan ideologi Syiah Nushairiyah, hal ini dapat dilihat dari kebijakan politik yang terkesan ekstrim dan menentang kelompok ideologi lain, terutama yang dianggap membahayakan kekuasaannya.

Simpulan

Nahwiyyin berikut ideologi madzhab fiqih dan dinamika sosial politik memiliki peran signifikan untuk turut serta memberi corak tersendiri dalam kajian nahwu yang meraka rumuskan. Ibnu Madha dalam menyusun kaidah nahwu dan dalam menyatakan fikirannya tentang masalah-masalah 'amil pada dasarnya menggunakan metode madzhab fiqih *al Dhahiri* sambil melakukan ijtihad sendiri sehingga melahirkan pendapat baru baik dari segi *ushûl nahwu* maupun *qawaid nahwu*. Selain sebagai cermin kepribadian seseorang, bahasa juga menggambarkan *setting* sosial yang sedang terjadi. Dinamika sosial dan politik masyarakat yang mendukung keputusan politik untuk menganut *madzhab al Dhahiri* berpengaruh dan membuka kesempatan bagi Ibnu Madha untuk menggungkapkan gagasannya dalam nahwu melalui buku *ar Rad ala al Nuhat*. Politik dan bahasa memiliki hubungan subordinatif, di sini salah satu menjadi subjek dan lainnya menjadi objek. Ideologi Syiah Nushairiyah dijadikan dasar yang mempengaruhi corak politik Hafizh al Assad dan putranya untuk bersinergi dengan baik dalam membentuk pemerintahan diktator di Suriah sehingga di sini politik menjadi subjek dan bahasa menjadi objek.

Daftar Pustaka

- Abdul Baqi bin Ibrahim, Syaikh Ghiyath. 26 Februari 2012. *Umat Islam dihimbau Qunut Nazilah untuk Ahlussunnah Suriah*. (<http://arrahmah.com/read/2012/02/26/18368-umat-islam-dihimbau-qunut-nazilah-untuk-ahlussunnah-suriah.html>, diakses 20 Maret 2012).
- Abdul Baqi bin Ibrahim, Syaikh Ghiyath. 27 Februari 2012. *Bagai Firaun, Rezim Syiah Suriah Paksa Tahanan Sujud Pada Foto Presiden* (http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47378:bagai-firaun-rezim-syiah-suriah-paksa-tahanan-sujud-pada-foto-presiden&catid=68:islam-dunia&Itemid=175 diakses 20 Maret 2012).
- Allamah, Tallal. 1993. *Tataw wur al Nahwi al Arabi fi Madrasatai al Bashrah wa al Kufah*. Bairut: Darl al Fikr al Lubnani.
- Al As'ad, Abdul Karim Muhammad. 1992. *Al Wasith fi Tarikh al Nahwi al*

- Arabi*. Al Riyadh: Darl al Syawaf.
- Al Battar, Saif. 26 Juli 2011. *Membongkar Kedok Rezim Nushairiyah Suriah* (<http://arrahmah.com/read/2011/07/26/14270-membongkar-kedok-rezim-nushairiyah-suriah.html>, diakses 19 Maret 2011).
- Al Furdhi, Abdullah bin Muhammad Ibnu. 1997. *Tarikh al 'Ulama wa al Ruwah li al 'ilmi al Andalusi*. Tahqiq Ruhayah Abd ar Rahman al Suyafi. Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyah,.
- Al Haiti, Abd al Qadir Rahim. 1993. *Khosois Madzhab al Andalusi al Nahwi Khilal al Qarni al Saabi'*. Jami'ah Qar Yunus: Binghazi.
- Al Halabi, Sulaiman. 1404 H. *Thaifah An Nushairiyah Tarikhuha wa Aqa'iduha*. Kuwait: Ad Dar As Salafiyah. Cet. 2.
- Al 'Ibady, Abd al Hamid. 1964. *Al Mujmal fi tarikh al Andalus*. Iskandariyah: Dar al Qalam.
- Al Khathib, Muhammad bin Ahmad. 1406 H. *Al Harakat Al Bathiniyah fil 'Alam Al Islami: Aqaiduha wa Hukmul Islam fiha*. Oman: Maktabah al Aqsha. Cet. 2.
- Al Khatsran. 1993. *Marahil Tatawwor al Dars al Nahwi*. Iskandariya: Darl al Ma'rifiyah al Jami'iyah.
- Al Majdi, Muhib. 14 Agustus 2011. *Serial Kajian Syia'h Ekstrim Nushairiyah* (<http://arrahmah.com/read/2011/08/14/14701-serial-kajian-syiah-ekstrim-nushairiyah-membongkar-kesesatan-dan-kekejaman-rezim-suriah-2.html>, diakses 19 Maret 2012).
- Al Suyuthi. Tanpa Tahun. *Bughyat al Wu'ah fi Thabaqat al Lughawiyyin wa al Nuhat*. Beirut: Al Maktabab al 'Ashriyyah.
- Al Thanthawiy, Muhammad. 1997. *Nasy'ah al Nahw wa Tarikh 'Asyhar al Nuhah*. Lubnan: Alam al Kutub.
- Al Thawil, Sayyid Razzaq. 1985. *Al Khilaf baina al Nahwiyyin: Dirasah, Tahlil, wa Taqwim*. Makkah al Mukarramah: Maktabah al Fishliyah.
- Al Yasiri, 'Ali Muzhir . 2003. *Al Fikr al Nahw 'inda al 'Arb Usulu wa Manahijuhu*.

- Beirut: al Dar al Arabiyyah Li al Maushu'at.
- Al Zubaydi, Abu bakar. *Thabaqat al Nahwiyyin wa al Lughowiyyin*, tahqiq Muhammad Abu al Fadhal. Al Qahirah: Dar al Ma'arif..
- Anan, Muhammad Abdulloh .1990. *Daulah al Islam fi al Andalus*. Al Qahira: Maktabah al Khanjy.
- Burdah, Ibnu. 03 Maret 2012. *Ketahanan Rezim Assad*. (<http://budisansblog.blogspot.com/2012/03/ketahanan-rezim-assad.html> diakses 20 Maret 2012).
- Chaer, Abdul. 2003. *Psikolinguistik Kajian Teoretik*. Jakarta : PT. RINEKA CIPTA.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Dhaif, Syauqi. 1983. *Al Madaris al Nahwiyah*. Al Qahirah: Darl al Ma'arif.
- Hasan, Tamam. 2000. *Al Ushul Dirasah Efistimologiah li al Fikr al Lugawi inda al Arab al Nahw Fiqh al lugah al Balagah*. Al Qahirah: Alim al Kutub.
- Hewitt, Martin. 1992. *Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the Welfare State*. Maryland: Harvester Wheatsheaf.
- Hitti, Philip K. 1974. *History of the Arabs*. The Macmillan : Press LTD, 1974.
<http://alfanarku.wordpress.com/2012/02/14/revolusi-suriah-islam-vs-syiah-ekstrim-nushairiyah/>
http://id.wikipedia.org/wiki/Hafez_al_Assad diakses 20 Maret 2012).
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad 'Ali. 1954. *Maratib al Ulum*. Al Qahirah.
- Ied, Muhammad.1989. *Ushul al Nahw al Araby fi nadhri al Nuhat wa Ra'y Ibnu Madha wa Dhau' Ilm al Lughoh*. Al Qahirah: 'Alim al Kutub.
- Ja'fari, Fadil Su'ud.2010. *Islam Syiah: Telaah Pemikiran Imamah Habib Husain al Habsyi*. Malang: UIN Press.
- Jinni, Ibnu. 1952. *al Khoshois*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Khalifah, Abd al Karim. 1986. *Taysir Baina al Qadhim wa al Hadits*. Oman:

Mansyurat Mujma al Lughoh al Arabiyah al Urdiyah.

Madha, Ibnu. 1988. *Al Rad 'ala al Nuhat*. Al Qahira: Dar al Ma'arif.

Ma'luf, Lois. 1986. *Al Munjid fi al Lunghah wa al A'lam*. Beirut: Al Maktabah al Syarqiyah.

Meillet, Antoine. 1948. *Linguistique Historique et Linguistique Genelare*. Second Edition, Paris.

Mufrodi, Ali. 2007. *Islam diKawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos.

Muhammad Abdulloh 'Anan.1990. *Daulah al Islam fi al Andalus*. Al Qahira: Maktabah al Khanjy.

Muslih, Mohammad. 2005. *Filsafat Umum*. Yogyakarta : Belukar.

Pabottinggi, Machtar.1996.*Bahasa, Politik dan Otosentrisitas dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.) Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.

Rahardjo, Mudjia. 2002 *Relung-Relung Bahasa; Bahasa dalam Wacana Politik Indonesia Kontemporer* .Yogyakarta: Aditya Media.

Rahardjo, Mudjia. 2007. *Hermeneutika Gadamerian, Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur*. Malang: UIN Malang Press.

Sarwat, Ahmad 2011 *Ilmu Fiqih*. Jakarta: DU Publishing.

Shihab, M. Quraish, 2007. *Sunni-Syiah bergandengan Tangan Mungkinkah? Kajian Konsep Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: Lentera Hati.

Suseno, Franz Magnis . 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta; Kanisius. 1992.

Thomas, Linda dan Wareing, Shan. 2007. *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wafi, Abd al Wahid. 1998. *Al Lugah wa al Mujtama*. Al Qahira: Dar al Nahdloh.

Yatim, Badri. 2000. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zahrah, Muhammad Abu. 1962. *Muhadharat fi Tarikh al Madhahib al Fiqhiyah*. Al Qahirah.

-----1996. *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, Penerj. Abd Rahman Dahlan dan Ahan Qarib. Jakarta: Lpgos.